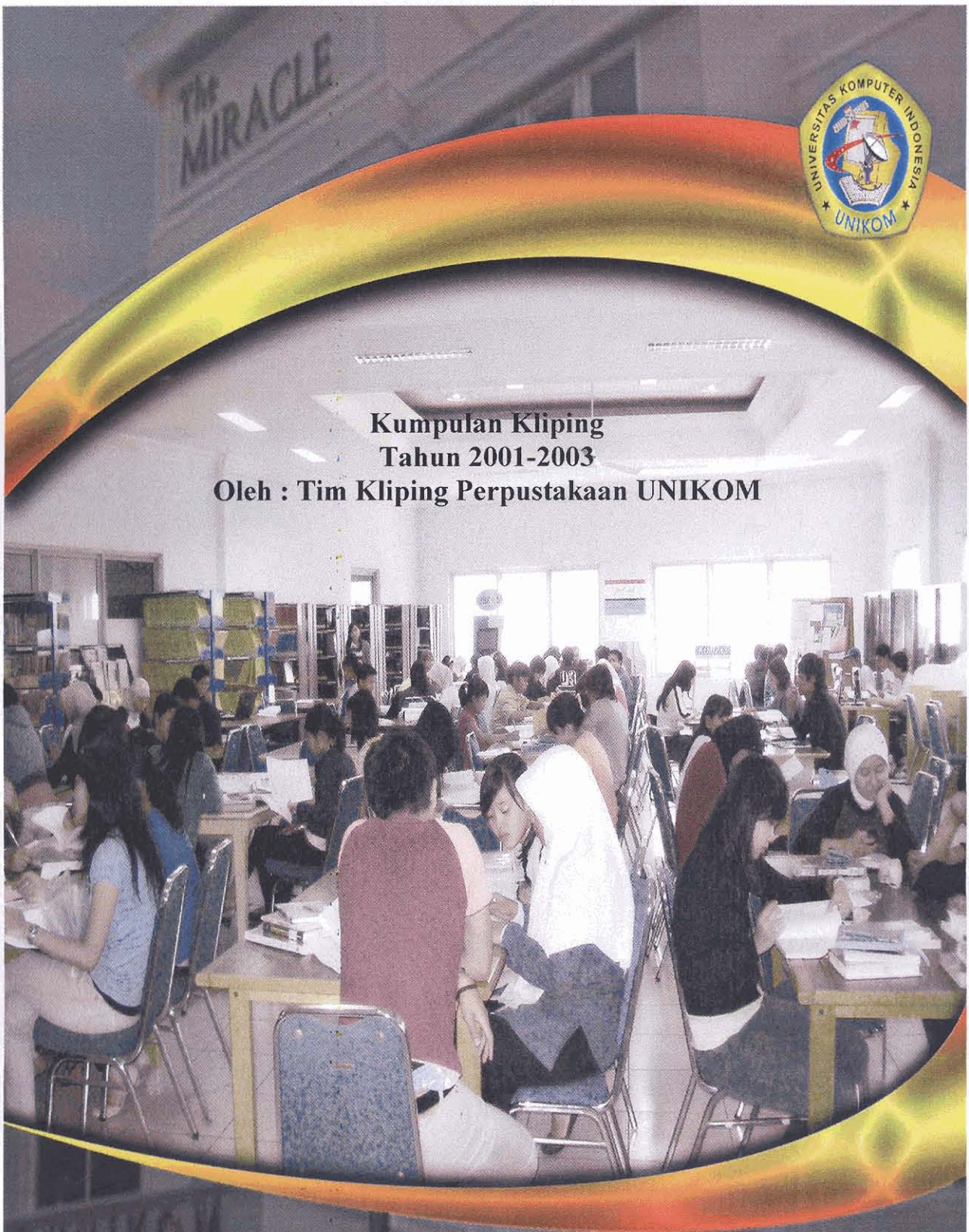


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 40 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : YURNALDI
Subjek : BIOGRAFI / 923.2

Di Balik Istana Bung Hatta di Bukittinggi

BANYAK wisatawan berkunjung ke Kota Bukittinggi, sekitar 93 km utara Padang, Sumatera Barat (Sumbar), bertanya-tanya dan bahkan nyaris tak percaya tentang keberadaan Istana Bung Hatta, yang persis berada di depan Jam Gadang, trade mark-nya Bukittinggi.

"Saya baru tahu, kalau di Bukittinggi ada Istana Bung Hatta. Apa dan bagaimana keberadaan istana tersebut, saya tidak tahu, kecuali tahu Bung Hatta, sebagai Wakil Presiden. Sejarah hampir tak pernah menyinggung-nyinggung soal keberadaan istana dan ada apa dengan Bung Hatta di Bukittinggi," kata Dianti (25), seorang mahasiswi asal Jakarta, Sabtu (3/8) di Bukittinggi.

Kenyataan senada juga dikemukakan Sisilia, pelajar SMU asal Medan, Sumatera Utara, yang ditemui secara terpisah di Bukittinggi. "Keberadaan Istana Bung Hatta dan peran Bung Hatta di kota kelahirannya, Bukittinggi, perlu diperjelas dan dimasukkan dalam pelajaran sejarah, agar semua dan setiap generasi mengetahuinya," ujarnya.

Ketidaktahuan banyak orang, termasuk masyarakat Sumbar sendiri, tentang peran Bung Hatta dan keberadaan Istana Bung Hatta di Bukittinggi, bisa dimengerti dan dimaklumi, karena sangat jarang buku-buku sejarah Indonesia menjelaskan hal ini.

"Kita prihatin, banyak hal-hal penting dalam perjuangan bangsa ini yang sengaja dikaburkan bahkan dihilangkan untuk kepentingan rezim penguasa (Orde Baru). Termasuk peran Bung Hatta di Sumatera (Bukittinggi)," kata sejarawan Universitas Negeri Padang, Dr Mestika Zed MA.

Sesungguhnya, kata Mestika Zed, ketika Hatta berada di Sumatera itulah perjuangan keberdekaan Indonesia memperoleh ciri yang lebih internasional.

◆◆◆

ADA dua kasus "revolusi sosial" yang meletus di Aceh dan Sumatera Timur, membuat Bung Hatta sangat tak ingin menunda-nunda lagi kunjungannya ke Sumatera. Karena krisis internal dalam tubuh Republik Indonesia itu mengancam keutuhan integrasi bangsa.

Menurut Mestika Zed, kedua konflik revolusioner itu pada umumnya ditujukan kepada kekuasaan bangsawan setempat. Revolusi di Aceh, yang lebih bercorak Islam ketimbang Marxis, tidak begitu mencemaskan Hatta. Akan tetapi keadaan di Sumatera Timur lebih berbahaya. Soalnya aksi-aksi revolusi sosial di sana jelas-jelas memiliki hubungan langsung dengan kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, tokoh yang dihormati di Sumatera, termasuk di daerah asalnya sendiri, Minangkabau.

Strategi perjuangan Tan Malaka dan pengikutnya sejak semula menentang keras kebijakan berunding yang diambil pemerintah. Mereka lebih menekankan garis keras lewat perjuangan bersenjata, yang dianggapnya sesuai dengan semangat militansi di kalangan kaum nasionalis di pulau itu. Tetapi selain itu, Hatta juga sangat mencemaskan pecahnya konflik internal di kampung halamannya.

"Semua itu telah menyadarkan Hatta akan tanda-tanda berbahaya perpecahan yang lebih luas dalam kepemimpinan revolusi di daerah asalnya sendiri. Beberapa bulan kemudian Hatta sampai di Sumatera dan tidak lama setelah itu, yakni bulan Juli 1947 Agresi Militer Belanda meletus. Hatta berada di Sumatera sampai menjelang meletusnya Agresi Militer kedua bulan Desember 1948. Selama masa antara dua perang kemerdekaan itulah Hatta bertahan dan memimpin perjuangan di tengah-tengah rakyat Sumatera," kata Mestika Zed.

Bagi Hatta khususnya dan juga bagi sebagian pemimpin di pusat, Sumatera adalah daerah alternatif sekaligus masa depan perjuangan Republik. Mengapa? Kesulitan-kesulitan yang dialami Republik dalam menghadapi Belanda di Jawa, khususnya setelah penandatanganan perundingan Linggarjati, segera menimbulkan spekulasi, bahwa pasukan Belanda, cepat atau lambat, akan terus mendesak dan akhirnya menduduki daerah-daerah strategis di Pulau Jawa.

Karena itu, perjuangan pada gilirannya akan berlangsung dalam pertempuran di pegunungan dan hutan belantara Sumatera. Demikian pentingnya Sumatera di mata Hatta, sehingga suatu waktu di awal Proklamasi Kemerdekaan RI ia pernah mengatakan, "Sumatera boleh jadi lautan api dan tenggelam ke dasar lautan, asal jangan jatuh ke tangan penjajah Belanda."

Menurut Mestika Zed, Hatta berangkat ke Sumatera awal Juni 1947, yakni 10 hari setelah menerima undangan dari KNI Sumatera. Meskipun masih ada yang merasa keberatan dengan rencana kunjungan itu, dengan mengatakan, bahwa di Yogya sedang kekurangan pemimpin dan pekerjaan di Pulau Jawa sangat banyak dan sulit ditinggalkan begitu saja, dan seterusnya, Hatta tidak lagi mau menunda keberangkatannya. Hanya menanggapi datar, tetapi tegas; "Apakah Sumatera itu bukan Indonesia?"

Akhirnya, Hatta berangkat dengan menumpang kereta api sore dari Stasiun Tugu, Yogya-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

karta, bersama rombongan yang cukup besar jumlahnya. Inilah kunjungan pertama Wakil Presiden RI ke Sumatera.

Sebagai negarawan besar yang dielu-elukan rakyatnya seperti terlihat dari sambutan yang diterimanya di setiap stasiun yang dilewatinya, dia disambut massa rakyat secara spontan dan hangat tanpa perlu dimobilisasi oleh pihak mana pun. Hampir di setiap tempat pemberhentian, Hatta "didaulat" untuk berpidato. Dalam perjalanan, ia harus memikirkan konsep pidatonya yang lebih baru supaya tidak menjadi basi di telingga para pendengarnya.

◆◆◆

WALAUPUN Hatta punya rumah tempat kelahirannya di Bukittinggi, namun selama keberadaannya di Sumatera ia menetap di rumah "Tamu Agung", yang kemudian dikenal *Gedung Tri Arga*, Wisma Hatta, dan terakhir diubah namanya menjadi Istana Bung Hatta. Istana Bung Hatta merupakan bagunan besar bekas *kediaman Asisten* Residen Belanda di Bukittinggi. Oleh Hatta digunakan sebagai tempat kediamannya dan sekaligus sebagai Istana Wakil Presiden RI di Bukittinggi. Dari sana Hatta memimpin perjuangan di Sumatera dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin setempat sambil mempelajari masalah-masalah mendesak yang dihadapi Sumatera umumnya, Sumatera Barat khususnya.

Salah satu prakarsa Hatta terpenting misalnya, mencoba menyatukan sejumlah besar partai dan organisasi sosial yang ada di Minangkabau di bawah satu komando, yaitu melalui apa yang dinamakan Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Gerakan BPNK berada di bawah suatu sekretariat bersama yang terdiri dari lima orang tokoh politik terkemuka di Sumatera Barat seperti Hamka, Chatib Sulaiman, Udin, Rasuna Said, dan Karim *Halim*.

Juga kebijakan Hatta untuk menyatukan kekuatan bersenjata yang terpecah-pecah dan kadangkala saling berbenturan, mendapat sokongan dari militer. Berbagai unit tempur yang saling terpisah di luar jajaran *tentara reguler* TNI dengan menggabungkan semua laskar-laskar dan tentara reguler di bawah suatu komando bernama Dewan Kelaskaran.

Penggabungan kekuatan yang lebih besar antara unsur sipil yaitu BPNK dengan jajaran TNI ke dalam suatu komando yang diinginkan Hatta, yakni apa yang disebut Front Nasional, bukanlah ikhtiar siasia. Hasilnya sangat dirasakan kemudian dalam menghadapi *dua agresi Belanda*. *Front Nasional* memainkan peran cukup penting dalam perjuangan Republik era Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Masih dalam rangka memperbaiki loyalitas lokal terhadap pusat, Hatta dengan berbagai cara juga melakukan reorganisasi pemerintahan sipil. Antara lain dengan memulihkan otonomi lokal melalui kebijaksanaan *menghapuskan* jabatan residen. Posisi Sub-Gubernur dan Gubernur Hasan untuk seluruh Sumatera juga kurang berfungsi. Kenyataan ini mendorong Hatta untuk menggembalikan bentuk pemerintahan kepada apa yang *diperjuangkannya pada awal* Proklamasi. Saat itu dalam sidang PPKI usul Hatta agar Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, dengan seorang gubernur sebagai kepalanya, telah ditentang Gubernur Sumatera Mr Teuku Moh Hasan, dan akhirnya ia kalah suara.

Sekitar bulan Mei 1947, ketika masih berada di Bukittinggi Hatta mendapat instruksi Soekarno agar berangkat ke India. Lewat jasa Biju Patnaik, seorang tokoh nasionalis India yang bersimpati dengan revolusi Indonesia, yang singgah di Bukittinggi dari perjalanan mengunjungi Yogya—diminta untuk membicarakan bantuan senjata *dari India*. *Hatta kembali* ke Sumatera (Bukittinggi) sekitar pertengahan Juli 1947, tetapi misinya untuk mendapatkan senjata, karena berbagai alasan, tidak berhasil.

Hatta kembali meneruskan perjalanan keliling yang terganggu *sebelumnya*, *seperti* ke Tapanuli dan Sumatera Timur. Akan tetapi, sampai di Pematang Siantar, yang baru saja menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera, hampir jatuh ke tangan Belanda. Hatta dan Gubernur Teuku Moh Hasan *tidak memiliki banyak pilihan*, kecuali mundur dan kembali ke Bukittinggi, yang sejak awal Proklamasi tetap berada di luar orbit kekuasaan Belanda.

Hatta dan rombongan, baru sampai di Bukittinggi pada tanggal *29 Juli 1947*. Kota itu segera menjadi penuh sesak. Sebelum perang penduduknya hanya sekitar 15.000 jiwa dan sesudah bulan Juli itu melonjak *hampir mencapai* 100.000. Soal perumahan yang sudah sulit menjadi semakin sulit, tetapi Kota Bukittinggi justru menjadi semakin penting kedudukannya. Bukan saja karena statusnya sebagai ibu kota Sumatera yang baru, melainkan juga *tempat kedudukan* Markas Besar Komandemen TNI Sumatera.

◆◆◆

PADA saat Jawa semakin terdesak akibat Agresi Militer Belanda I, di samping "terkepung" oleh kontrol blokade ekonomi Belanda yang semakin ketat, Sumatera tampil sebagai daerah alternatif dan memiliki ruang gerak yang relatif bebas dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan. Kesempatan ini telah digunakan Hatta dengan sebaik-baiknya.

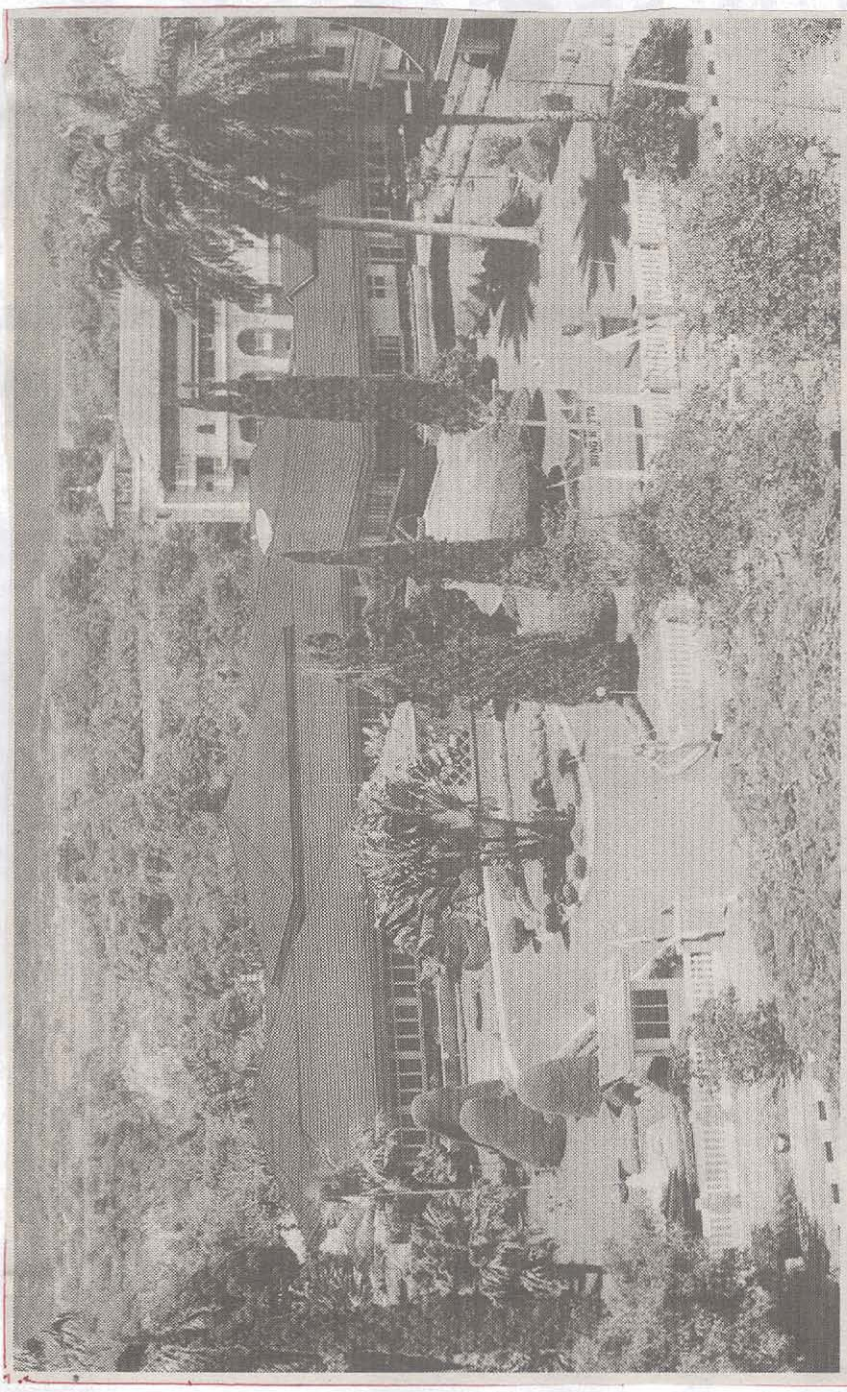
Hatta baru kembali ke Jawa tanggal 5 Februari 1948, setelah dijemput langsung oleh sejumlah pemimpin pusat, termasuk di antaranya Perdana *Menteri Amir Sjarifuddin*, Sjahrir, Zaenal Baharuddin (tokoh pemuda), dan Prawato (Masyumi), menyusul diterimanya oleh Pemerintah Persetujuan Renville.

Untuk melepas Hatta, digelar suatu rapat besar di lapangan *Kantin*, *di pusat Kota* Bukittinggi. Tampil ke podium tiga tokoh pembicara secara berganti-ganti. Hatta berpidato pada giliran yang pertama, untuk mengucapkan pidato perpisahan dengan rakyat Sumatera Barat. Pidato Hatta singkat saja, *inilah* kutipannya:

"Bahwa Perjanjian Renville hanyalah satu mata rantai dalam perjuangan kita yang *panjang*. Ada orang yang mengatakan kita kalah. Tetapi aku peringatkan, bahwa bangsa yang kalah ialah bangsa yang mengaku kalah. Perjuangan kita teruskan dengan berbagai risikonya. Kita sudah diterima mempertahankan kemerdekaan kita dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebab itu, Republik Indonesia tidak lagi bisa dihapuskan dari peta dunia."

Sejarawan Mestika Zed menjelaskan, Audrey Kahin dalam kajiannya tentang revolusi *di Sumatera Barat*, *melihat* kehadiran Hatta di tanah kelahirannya itu sebagai agen utama yang menjamin subordinasi isu lokal terhadap isu nasional. (YURNALDI)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



KOMPAS/YURNALDI

Istana — *Istana Bung Hatta merupakan bangunan besar bekas kediaman Asisten Residen Belanda di Bukittinggi. Oleh Hatta digunakan sebagai tempat kediaman sekaligus Istana Wakil Presiden RI. Dari sini ia memimpin perjuangan di Sumatera dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin setempat sambil mempelajari masalah-masalah mendesak yang dihadapi Sumatera umumnya, Sumatera Barat khususnya.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : ADAM, ASWI WARMAN
Subjek : IKLASS IWA KUSUMA SUMANTRI - BIOGRAFI 923.5

Iwa Kusuma Sumantri, Penggagas Proklamasi

DALAM upacara kenegaraan 17 Agustus, selalu dibacakan teks Proklamasi. Naskah itu semula disebut Soekarno "Maklumat", namun Iwa Kusuma Sumantri yang mengusulkan pemakaian nama "Proklamasi". Iwa adalah pejuang kemerdekaan yang lebih senior dari Bung Hatta, pernah menjadi Ketua *Indische Vereeniging* tahun 1923. Karena sempat belajar di Rusia dan pernah menikahi gadis Moskwa serta pendukung Tan Malaka, namanya dilupakan rezim Orde Baru.

DIBUANG ke Banda 10 tahun lebih karena memimpin gerakan serikat buruh di Medan, ia pernah beberapa kali menjadi menteri semasa kepresidenan Soekarno. Saat Soekarno-Hatta membuat testamen politik 1 Oktober 1945, Iwa merupakan salah seorang yang dipercaya meneruskan kepemimpinan nasional. Ketika menjadi Menteri Pertahanan, ia berpendapat, Komando Daerah Militer Jakarta Raya harus berdiri sendiri, terpisah dari Jawa Barat. Pada akhir hayat, ia sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Rektor Universitas Padjadjaran. Betapa jasanya untuk Tanah Air dan bangsa, toh, Orde Baru tidak berkenan memberi predikat pahlawan nasional kepadanya.

Nonkooperasi terhadap penjajah

Bila Soekarno dikenal dengan slogan persatuan nasional yang dicanangkan sejak muda, Iwa Kusuma Sumantri adalah tokoh yang memegang prinsip "nonkooperasi terhadap penjajah". *Indische Vereeniging* merupakan salah satu organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan yang segera dan tidak bersyarat. Sebagaimana diketahui, organisasi ini lalu berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI melandaskan perjuangan pada empat prinsip yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya. Perhimpunan ini pula yang pada tahun 1925 mengeluarkan Manifesto Politik yang dianggap Profesor Sartono Kartodirdjo lebih fundamental dari Sumpah Pemuda 1928.

> **"Iwa Kusuma Sumantri adalah tokoh yang memegang prinsip "nonkooperasi terhadap penjajah".**

Meski hidup pas-pasan, para pelajar Indonesia di Eropa itu betul-betul memanfaatkan waktu di negeri asing untuk meraih sesuatu bagi masa depan mereka dan bangsa. Di kala musim panas tiba, sekolah libur tiga bulan, mereka bertebaran di Eropa untuk "melebarkan penglihatan". Iwa diberi mandat pengurus PI yang dipimpin Boedyarto dan Hatta untuk berangkat ke Rusia guna mempelajari front persatuan (*Eenheidsfront*). Intinya, bagaimana merapatkan barisan secara internasional melawan penjajahan. Ia ada di sana selama 1,5 tahun. Dalam periode singkat, ia sempat menikah dengan gadis Rusia dan memiliki seorang putri.

Prinsip nonkooperasi ini diteruskan Iwa setelah kembali ke Tanah Air. Bulan November 1927 Iwa pulang ke Tanah Air setelah 5,5 tahun merantau di Eropa. Mula-mula ia bekerja di Bandung, tetapi tak lama kemudian ia diminta pamannya membuka kantor pengacara di Medan. Di kota ini, Iwa aktif dalam pergerakan dengan membuat surat kabar serta mendekati kaum buruh dan tani yang tertindas.

Akibat aktivitas ini, 25 Juni 1930 Iwa dibuang ke Bandaneira. Ia dituduh "berupaya menggulingkan kekuasaan yang sah" (*aanslag tot omverwerping van het wettig gezag*). Di pulau inilah akhirnya Iwa terasing selama 10 tahun lebih.

Prinsip nonkooperasi terhadap penjajah ini pula yang mendasari tindakan Iwa setelah proklamasi kemerdekaan untuk mendukung Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka. Persatuan Perjuangan adalah himpunan 141 organisasi politik (termasuk Masyumi dan PNI), lasykar, dan lain-lain yang dibentuk di Purwokerto awal tahun 1946. Dalam kongresnya di Solo beberapa hari sesudah itu, kelompok ini mengeluarkan minimum program yang terdiri dari tujuh pasal (yang berasal dari pidato Tan Malaka): 1) Berunding atas pengakuan Kemerdekaan 100 persen; 2) Pemerintahan rakyat (kemauan pemerintah sesuai kemauan rakyat); 3) Tentara

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

rakyat (kemauan tentara sesuai kemauan rakyat); 4) Menyelenggarakan Tawanan Eropa; 5) Melucuti senjata Jepang; 6) Menyita hak dan milik musuh; 7) Menyita perusahaan (pabrik, bengkel, dan lain-lain) dan pertanian (perkebunan, pertambangan dan lain-lain) musuh

Nasionalis-revolusioner

Iwa sendiri sering dikaitkan bahkan dicap sebagai tokoh komunis.

Alasannya, pertama karena ia pernah merantau di Moskwa untuk mempelajari front perjuangan melawan kolonialisme dan memiliki istri warga Rusia. Kedua, istrinya, Anna Ivanova memiliki adik perempuan yang kawin dengan tokoh komunis Indonesia, Semaoen. Ketiga, dalam masa pergerakan kemerdekaan, intel penjajah Belanda sering mengaitkan aktivitas pemuda pejuang dengan gerakan komunis. Keempat, Iwa dalam beberapa hal setuju dengan pemikiran Tan Malaka yang juga diasosiasikan sebagai pejuang kiri. Ia juga tokoh Persatuan Perjuangan dan Partai Murba yang didirikan Tan Malaka. Kelima, saat Iwa menjadi Menteri Pertahanan, usaha menertibkan tentara tidak disenangi para perwira yang terkena kebijakan itu. Meski Iwa merasa bahwa wewenang sebagai Menteri Pertahanan juga dibatasi oleh atasannya, ia tetap melakukan tugasnya dengan optimal. Saat itu ada perwira tinggi yang diketahui Iwa melakukan penyelundupan.

Iwa sendiri pernah mengecam komunis sebagai refleksi dari rivalitas antara PKI dengan Murba. Murba adalah partai yang didirikan Tan Malaka 7 November 1948. Iwa Kusuma Sumantri sendiri menjadi anggota Murba 5 Desember 1949. Menjawab tudingan kelompok tertentu seperti militer yang mengecap Iwa sebagai tokoh kiri, Presiden Soekarno membela dengan lantang: "Iwa seorang nasionalis-revolusioner!"

DR ASVI WARMAN ADAM
Sejarawan LIPI

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 28 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 3 / 7-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. KLASS : FILSAPAT - BIOGRAFI / 921

Niccolo Machiavelli

NICCOLO Machiavelli (1469-1527) dikenal terutama karena karyanya *Il Principe* (Sang penguasa). Buku itu ditulis Machiavelli di Desa Santa Andrea, dekat San Cassiano, selatan Kota Firenze (Italia) tahun 1513. Di desa itulah ia mengasingkan diri bersama istrinya, Marietta Corsini, dan enam anak mereka (*Politik Kekuasaan, Menurut Niccolo Machiavelli*, disadur Pax Benedanto).

Buku itu ditulis setelah ia dipecat dari jabatannya sebagai Sekretaris Departemen II Republik Firenze. Jabatan itu diterima Machiavelli setelah sahabatnya, Piero Soderini, berhasil menggulingkan pemerintahan teokratik Girolamo Savonarola, seorang biarawan Ordo Dominican tahun 1498.

Sebelumnya, Savonarola menggulingkan penguasa Republik Firenze yang dinilai tidak becus memerintah, Pietro dari wangsa Medici.

Yang menarik adalah, karena bukunya itulah Machiavelli banyak dikecam. Mengapa? Dalam *Il Principe*, Machiavelli mengembangkan teknik-teknik untuk merebut dan memantapkan pegangan atas kekuasaan politik. Demi tujuan itu sang penguasa jangan mau dihambat oleh norma-norma moral. Ia harus bersikap kejam, tidak takut bohong, bersedia membunuh, jangan merasa terikat pada janji atau ikatan utang budi.

Seorang penguasa yang bermurah atau baik hati tidak akan berdaya. Kesediaan untuk mempertahankan kekuasaan dengan sarana apa pun yang efektif, termasuk yang tidak bermoral, adalah inti paham yang disebut Machiavellisme.

◆◆◆

PENDAPAT Machiavelli itu lahir dari hasil renungannya. Saat merenung, ia bertanya-tanya: mengapa penguasa bisa runtuh? Semakin mencari jawabnya, kian penasaran Machiavelli. Konon, Machiavelli menemukan jawabannya: negara akan aman dan bertahan lama, bila penguasa kuat. Untuk itu, penguasa tidak cukup hanya berwatak pemberani, gagah perkasa, apalagi hanya mengandalkan nasib mujur. Ia harus penuh perhitungan dan lihai menggunakan segala kesempatan.

Jelas jadinya, menurut Machiavelli, tujuan utama berpolitik bagi penguasa adalah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangannya. Baginya, politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah, dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Dalam urusan politik, tidak ada tempat membicarakan masalah moral. Hanya satu hal yang penting ialah bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaidah etika politik alternatif bagi Machiavelli adalah: tujuan berpolitik adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan (*Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa*, kata pengantar oleh DR M Sastrapratedja dan Drs Frans M Parera).

Akan tetapi, menurut Franz Magnis-Suseno (*Machiavelli, Guru Benar atau Guru Konyol?* dalam *Kompas*, 1997), untuk mengerti *Il Principe* dengan tepat, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah konteksnya. Waktu Machiavelli menulis *Il Principe* Italia sedang menjadi rebutan antara Spanyol dan Perancis, dan daerah-daerah dibuat tidak aman oleh *condotieri-condotieri* (kepala pasukan liar) yang berkeliaran.

Fokus Machiavelli adalah bagaimana kekacauan itu dapat diakhiri. *Il Principe* mau memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang penguasa dapat memantapkan kekuasaannya dan dengan demikian menciptakan dasar untuk membangun negara yang kukuh.

Yang kedua adalah buku Machiavelli yang kedua, *Discorsi*, yang baru terbit sesudah ia meninggal. Dalam buku tersebut menjadi jelas apa yang sebenarnya menjadi motivasi Machiavelli mengembalikan kekuatan dan kedaulatan Italia dan untuk itu ia mengacu pada keperkasaan Republik Roma kuno.

Minat Machiavelli yang sebenarnya bukanlah kemantapan kekuasaan penguasa, melainkan kemantapan negara republik yang hanya dapat dibangun sesudah kekacauan berakhir. Agar negara menjadi mantap, rakyat sendiri harus mantap, harus berpartisipasi dalam mengurus negara. Kekuatan negara tidak tergantung hanya dari kemampuan penguasa, melainkan juga dari kemampuan rakyat.

Akan tetapi, banyak penguasa yang salah kaprah dalam memahami karya Machiavelli itu. Bahkan, buku Machiavelli dianggap sebagai buku pegangan para diktator, sebut saja Adolf Hitler, Stalin, Lenin, dan juga Benito Mussolini dalam mempertahankan kekuasaannya. Yang banyak dipegang hanyalah bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara: entah itu dengan teror, dekrit, maklumat, mengerahkan massa, memaklumkan keadaan darurat, pemerintahan tangan besi, dan lain sebagainya.

Yang penting, kekuasaan tetap di tangan entah apa akibatnya bagi bangsa dan negara! Kekuasaan adalah kekuasaan!

Gambaran seperti itulah yang akhir-akhir ini kita saksikan di negeri ini. Zaman Machiavelli sudah berlalu, memang. Akan tetapi, "warisan" gagasan masih tetap hidup. Machiavellisme menisbikan nilai etis dalam kehidupan politik. Itulah sebabnya, (seorang) penguasa dapat saja memutuskan dan melanggar ucapannya, janjinya, dan sumpahnya yang disampaikan kepada rakyatnya demi terwujudnya keinginan diri, kemuliaan diri! (ias)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 22 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 1.5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : MULYADI
Subjek / No. Klass : INDONESIA - SEJARAH - RINGKASAN / 959.8

Indonesia Negara "Persekongkolan"

SEJARAH Indonesia tidak bermula dari Sriwijaya, Majapahit, Pajang, Demak, dan Mataram, sebagaimana yang dikisahkan sejarawan dan budayawan Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia (baca: India kepulauan) sebagai negara bangsa (*nation state*) sesungguhnya ahistoris karena sejarahnya baru berawal dan bertolak dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sebelum Proklamasi, yang ada hanyalah sejarah kejayaan negara-negara pulau di antara Benua Asia dan Australia (baca: nusantara), sejarah negara kolonial dan negara-negara terjajah berikut tokoh-tokoh perlawanannya, serta sejarah milik orang perorang dari kaum terpelajar yang bekerja sama melawan penindasan. Sejarah Indonesia tidak setua usia negara-negara yang diklaim pernah menjadi bagian masa lalunya.

Secara teoritis Indonesia memang sebuah negara karena syarat berdirinya negara telah dimiliki, namun sebagai bangsa masih perlu diperdebatkan. Syarat *de jure* dan *de facto* (baca, penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan) yang menjadi landasan Proklamasi Kemerdekaan amat rentan terhadap disintegrasi karena kedua syarat itu bukan bagian dari masa lalu Indonesia. Dalam konteks negara, sebenarnya Indonesia tidak pernah dijajah apalagi selama kurang lebih 350 tahun.

Kaum terpelajar dan para *founding fathers* dalam mendirikan negara telah mencurahkan seluruh perhatian dan pemikirannya agar para pemimpin, pewaris tahta, dan rakyat eks-negara-negara jajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, tidak keberatan dibubarkan negaranya dan mau menyerahkan penduduk atau bangsa dan tanah air atau wilayahnya untuk dijadikan "bahan baku" pembuatan negara baru. Mereka pasti tahu kalau para pemimpin eks-negara-negara jajahan, seperti Sultan Baabullah dan Pattimura di Ambon, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka di Sulawesi, Sumatera dengan terlebih dahulu mencurigai isi. Pembukaan UUD 1945 sebagai tipu muslihat belaka. Untuk tuntutan itu dapat ditelusuri kasus Timor Timur yang sudah merdeka, Aceh yang sedang bergolak, dan Papua yang sementara kampanye.

Daerah dengan perasaan eks-negara jajahan dan ingatan masa lalunya yang cemerlang menganggap pusat yang identik Indonesia dan Jakarta tidak lebih dari sekadar reinkarnasi negara kolonial yang secara tersembunyi menindas, merampas harga diri, dan mengeksploitasi seluruh potensi sumber daya daerah. Slogan persatuan bahwa Pusat pusatnya Daerah dan Daerah daerahnya Pusat dalam perspektif politik pemerintahan telah ditolak Daerah akibat penerapan asas desentralisasi dan konsentrasi model kekuasaan laba-laba di semua sektor kehidupan sebagai ciri negara kesatuan yang cenderung otoriter dan totaliter. Harmonisasi hubungan Pusat-Daerah yang seharusnya tercipta dengan penerapan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan *medebewind* sebagai ciri persatuan yang cenderung demokratis menjadi berantakan lantaran sikap Pusat yang terlalu subyektif menilai aspirasi dan loyalitas Daerah, dan Sikap Daerah yang sangat apriori dan telanjur kecewa pada *political will* Pusat. Daerah menganggap Pusat lebih mementingkan "Kesatuan" daripada "Persatuan" padahal semboyan Bhineka Tunggal Ika justru sebaliknya.

◆◆◆

DILEMA lingkaran setan muncul ketika Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan, mengingat Pusat dan Daerah berstandar ganda dalam menyikapi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sikap standar ganda ini secara tidak langsung akan merangsang munculnya konflik laten dan permanen hubungan Pusat-Daerah yang tidak pernah tuntas sejak UUD 1945 dibahas, dirumuskan, dan ditetapkan dalam sidang BPUPKI/PPKI. Di satu sisi, sudah waktunya bagi Pusat untuk merekonstruksi sistem dan struktur penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis dan Daerah sudah saatnya mendekonstruksi pemerintahannya agar lebih efektif dan efisien. Di lain sisi, Pusat masih menuding tuntutan dan aspirasi Daerah sebagai bentuk upaya disintegrasi dan Daerah tetap menuduh sikap Pusat sebagai kolonialisme terselubung.

Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung di Jawa, serta Teuku Umar dan Teuku Cik Ditiro di Sumatera sedikit pun tidak pernah bercita-cita apalagi berpesan kepada rakyat dan keturunannya, jika kelak penjajah pergi agar negaranya dibubarkan atau digabung dalam suatu negara baru bernama Indonesia. Mereka juga sadar betapa besar biaya sosial politik yang harus dibayar bila dalam mengambil alih "bangunan" eks-negara-negara jajahan tanpa konsesi politik perjuangan dan strategi politik.

Agar tidak disesali dan dimintai pertanggungjawaban oleh para pemimpin dan pewaris eks-negara-negara jajahan, mereka tidak hanya memberi konsesi politik tetapi juga telah menerapkan strategi politik ganda dengan mengaku sebagai putra-putri dan mengatasnamakan aspirasi kemerdekaan eks-negara-negara jajahan dalam mengikrarkan: satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa. Mereka akhirnya bersekongkol mendirikan negara baru dengan menyebut Tanah Air Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan negara dan pemerintahan Indonesia dengan pusat Jakarta.

Proklamasi Kemerdekaan sebagai titik tolak dari keseluruhan sejarah Indonesia sebagai *nation state* tentunya diterima luas dan disepakati secara diam oleh para pemimpin, pewaris tahta, dan rakyat eks-negara-negara jajahan karena telah mendapat konsesi politik perjuangan yang mencakup kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran, serta susunan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dianggap mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

◆◆◆

KINI usia Indonesia lebih setengah abad. Tak satu pun dari butir konsesi politik itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kini Pusat beserta pemerintahannya tengah diadili oleh Daerah dengan tingkat tuntutan; otonomi (baca: istimewa dan khusus), federasi, dan merdeka. Mestinya Indonesia "kaget dan terbangun" dengan tingkat tuntutan itu karena hakekat sesungguhnya bukan sekadar "demam otonomi", tetapi penolakan atas keseluruhan konsesi politik yang pernah dijanjikan. Tuntutan itu juga dapat diartikan sebagai penolakan diam para pewaris tahta atau rakyat eks negara-negara jajahan atau Daerah terhadap negara buatan kaum terpelajar dan *founding fathers* mayoritas asal Jawa.

Konflik Pusat-Daerah dengan dukungan persaingan global menjadikan negara-negara neo imperialisme menemukan momentumnya untuk intervensi ke dalam urusan internal Indonesia. Tak pelak lagi Indonesia menjadi ladang operasi spionase

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

dan bulan-bulanan HAM, demokrasi, dan *social justice*. Sehingga sangat sulit tidak mempercayai tingkat keterlibatan organisasi *telik sandi* (intelijen) negara-negara yang pro dan kontra atas *chaos* dan disintegrasi Indonesia. Amerika Serikat (CIA), Rusia (KGB), Israel (Mossad), Uni Eropa melalui Inggris (MI-6), Australia (Organization National Assesment, ONA), Cina (Red China Service, RCS), dan Jepang (Yakuza dan Red Army, RA) dengan *grand strategy* masing-masing tidak mungkin menutup mata dan memalingkan *muka dari persoalan* dan masalah Indonesia.

Operasi Tempest, ledakan Exxon, penundaan IMF atas pencairan dana pinjaman, kerusuhan antar-agama dan etnis di berbagai daerah, isu minoritas dan gender yang kian gencar di sektor politik dan ekonomi, membanjirnya produk luar negeri (baca; Cina), Timor Timur, Aceh, Irian, penggulingan Soekarno, kejatuhan Soeharto, penjegalan BJ Habibie, dan desakan mundur bagi Abdurrahman Wahid adalah sejumlah kasus yang seharusnya menjadi pelajaran dan alat evaluasi betapa besar perhatian dan kepentingan negara lain atas Indonesia.

Kali ini pusat dan daerah harus percaya, bahaya serius dari dalam dan luar berupa *chaos* dan disintegrasi tengah mengancam. Kasihan jika rakyat eks-negara-negara jajahan (baca; Indonesia) yang hanya sempat di antar sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan dipaksa "menikmati" dagelan politik dan krisis multi dimensi, serta harus "pulang" ke eks-negaranya yang telah tiada. Tidak ada yang lebih bertanggungjawab dalam membebaskan dan mencegah kesengsaraan rakyat kecuali elite pemerintahan karena tidak hanya posisi dan tugasnya yang sensitif terhadap konflik, tetapi juga karena mereka adalah simbol kaum terpelajar dan para *founding fathers* yang amat terkenal dengan kebijakan strategi, memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan Indonesia.

◆◆◆

BAHAYA sedang mengancam itu lebih membutuhkan perhatian dan penanganan ekstra hati-hati ketimbang membuang energi lewat adu perebutan kekuasaan ke dalam, para elite pemerintahan perlu melakukan percepatan pemenuhan isi konsesi politik kepada daerah, dan ke luar, agar lebih aktif menciptakan ketertiban dan keterlibatan dalam proses perdamaian agar dunia internasional menaruh hormat dan simpati. Bila semua itu dilakukan maka upaya untuk mempertahankan Indonesia sudah lebih cukup. Namun hal itu amat sulit dilakukan bila penyelesaiannya hanya diserahkan kepada para politisi yang cenderung menggunakan "kepala dan perutnya" demi kekuasaan dan kepentingan sesaat, tanpa melibatkan kaum negarawan dengan "dadanya" yang terkenal ketulusan dan besar hati. Betapa rapuh dan tertinggalnya *nation state* ini jika alasan "belajar berdemokrasi" sehingga tetap membiarkan para politisi tampungan yang hanya karena calonnya gagal dan atau diminta mundur jadi presiden lalu membakar kota X atau kota Y.

Jika dulu di tangan kaum terpelajar dan *founding fathers* Indonesia berdiri, kini di tangan para elite pemerintahan harapan rakyat dititipkan agar sistem dan struktur pemerintahan (baca; pusat, daerah, dan desa) dapat menyatu dalam susunan pemerintahan negara yang mencerminkan *good governance*. Jika pada akhirnya nanti harus terjadi, mudah-mudahan tidak di tangan elite politik koalisi Jawa-Sumatera (baca, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Akbar Tandjung) negara "persekongkolan" ini bubar. Semoga.

◆ **Mulyadi**, *dosen ilmu pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar.*